



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Jend.Gatot Subroto III – 5 PURWOKERTO Kode Pos 53116
Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050 / 10728 / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi Publik yang dikecualikan.
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas PEKERJAAN UMUM Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 September 2019

KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



I R A W A D I

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019**

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Visi dan Misi	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Dinas PU
		Rencana Strategis	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website Dinas PU
		Struktur Organisasi dan Profil Dinas PU	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Dinas PU
		Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, kompetensi, pegawai)	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Dinas PU
		Tugas wewenang dan Fungsi	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Dinas PU
		Informasi Tentang Domisili dan alamat lengkap	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	
		Informasi tentang Rencana Kegiatan Tahunan	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Dinas PU
		Informasi tentang Rencana Kegiatan Unggulan	Kasubag Perencanaan	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	

2.	Informasi tentang Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Nama Program dan Kegiatan	Sekretaris	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Dinas PU
		Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Sekretaris	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	
		Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Kasubag Perencanaan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website RFK-RKO
		Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kasubag Perencanaan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website RFK-RKO
		Nilai Anggaran	Kasubag Perencanaan	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website RFK-RKO
		Rencana, Rakor, dll. Pada SKPD Kab/Ko pada tahun berjalan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap Kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Medsos Dinas PU
		Rencana Pelaksanaan Diklat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap Kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	
		Agenda Penting lainnya yang sifatnya bukan rahasia	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap Kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Medsos Dinas PU
3.	Informasi tentang Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Ringkasan Informasi Kinerja	Kasubag Perencanaan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	
		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kasubag Perencanaan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website e-sakip
		Laporan Layanan Informasi Publik	Kasubag Perencanaan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	
		Informasi Peraturan, Keputusan, dan atau Ketetapan beserta Rancangannya yang mengikat publik	Kasubag Perencanaan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	
		Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	KPA	Tiap Proses Pengadaan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Sirup
		Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Tahunan			Website LPSE

B. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	Informasi tentang Organisasi Administrasi Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun setelah perubahan	
2	Naskah Dinas	Rencana strategis	Kasubag Perencanaan	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
		Rencana kerja tahunan	Kasubag Perencanaan	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
3	Peraturan/Keputusan	Peraturan/Keputusan yang telah diterbitkan	Staf PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	
4	Kegiatan / aktifitas	Kegiatan / aktifitas karyawan / karyawati dinas	Staf PPID	Setiap kegiatan khusus	Soft copy dan Hard copy		

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	Informasi tentang kondisi jalan dan jembatan	Informasi tentang Data Jalan dan Jembatan	Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
2	Informasi tentang kondisi jalan dan jembatan	Informasi tentang Kerusakan Jalan dan Jembatan	Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
3	Informasi tentang kondisi jalan	Informasi tentang longosoran jalan	Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
4	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang SDA dan Data Jaringan Irigasi	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
5	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang Jadwal Pengeringan Saluran Irigasi	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum

6	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang Data Curah hujan	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
7	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang Data Sungai, Embung dan Mata Air	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
8	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang Sempadan saluran, Danau / Embung dan Mata Air	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum
9	Informasi tentang kondisi SDA-Irigasi	Informasi tentang Bencana Alam Banjir	Kabid SDA dan Irigasi	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Website Dinas Pekerjaan Umum

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019**

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	BADAN PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Data pribadi penyedia jasa	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi Penyedia jasa - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
2	Rekomendasi teknis IMB	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi/perusahaan - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
3	Rekomendasi teknis GSS	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi/perusahaan - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
4	Data personal pelanggaran IMB dan GSS	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
5	Data LHK ASN Dinas PU	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi Penyedia jasa - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	

6	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,		- Melanggar HAM		
7	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.		- Melanggar HAM		
8	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP P 17 huruf h.		- Melanggar HAM		
9	Rincian hasil tes potensi/ kompetensi PNS	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
				- Melanggar HAM		
10	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
				- Melanggar HAM		
11	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.		- Melanggar HAM		
12	Data PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
				- Dapat menghambat proses penegakan hukum		
13	Daftar Nilai SKP dan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
	DP-3 PNS	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.		- Melanggar HAM		
		- PP No. 10 Tahun 1978 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6				

14	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.		- Melanggar HAM	- Melindungi keamanan dan Kenyamanan PNS.	
		- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis Ps 10.				
15	Data Usulan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Terbatas sampai dengan pelantikan.	Menggangu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	
		- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.				
		- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.				
16	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia. meliputi :	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.	Selama masih berlaku	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	
	- dokumen keuangan (SPJ berikut lampirannya, Dokumen anggaran dan otorisasinya, surat Pencairan anggaran	- UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan				
	- Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan					
17	Dokumen penawaran kontrak.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektifitas pe	
		- Perpres No. 54 th. 2010 ttg Pengadaan Barang /jasa Pemerintah				

18	Laporan hasil pemeriksaan.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
		- PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.			
		- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.			
		- Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.			
		- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.			
		- Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)			

19	Bukti Tindak Lanjut LHP	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	
		- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
		- Pp No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.				
		- Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.				
		- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah				
		- Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.)				
		- Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.				
20	Lokasi Server	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30-37).	Tidak terbatas	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data .	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data .	
21	Internet Protocol/IP Adress private .	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	Tidak terbatas	Penerobosan /penyalahgunaan hak akses	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data	
22	Bandwidth managemen	- UU No11 th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	
		-				
23	Kode akses elektronik	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer.	

24	Sistem keamanan Elektronik	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j).	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer	
25	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf h).	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga rahasia (data kekayaan) pribadi	

KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



Dr. Ir. IRAWADI, CES.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199103 1 007